

PERAN JURNALISME WARGA (*CITIZEN JOURNALISM*) BERBASIS SANTRI SEBAGAI PENYEIMBANG KOMUNIKASI KEAGAMAAN LOKAL KEDIRI

Diah Handayani, M.Si.*

Stain Kediri

Email : diahhandayani2013@gmail.com

Abstrack

The aim of this research is to improve awareness of the religious multivarians local information that constructed by the Pesantren. Improving the dakwah Pesantren by constructed the santri capacity improving the santri skills to conduct the news, features, public opinion, and the articles by citizen journalism. And the process of social construction of santri about radicalism of pesantren, according to four stages of social construction of mass media by Burhan Bungin; phase of construction materials prepare, phase of construction distribution, materials construction formation, and phase of confirmation. This research based on qualitative research method.

Explaining and answering the questions of “why” and “how” of the research focus in this case study in The Hidayatul Mubtadi’ien Lirboyo Pesantren. This research used data from interview with editorial staff, pesantren, Al-Muttaqien, also from Radar Kediri and Stain Kediri. This project held on the three institution are collaborated to introduce the partnership between the researcher, civil society, and the economic society.

The result of this research shows that during preparation phase of construction materials santri stood up for capitalism but still based on consideration of news quality and values. Santri distributed its construction weekly, to Middle-Class city readers. By citizen journalism santri made the construction about radicalism at pesantren formed by means of negative image messages about pesantren, which extended through construction of text and selection of news sources.

This influenced by ideological factor and journalists closeness to police and intelligent sources. Confirmation phase occurred when Al-Muttaqien sent a protest letter to santri into the social media, which caused readers interaction.

Keywords: *citizen journalism, journalism product, the religious local informasion, santri, social media.*

Abstrak

Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah meningkatkan kesadaran arti penting keragaman informasi lokal yang dibangun oleh pesantren sebagai salah satu upaya dakwah di masyarakat melalui jurnalisme warga (*citizen journalism*), meningkatkan kapasitas santri mengembangkan komunikasi keagamaan lokal dan meningkatkan keterampilan santri membuat produk jurnalistik dalam bentuk berita, *features*, opini, dan artikel dengan menggunakan teknologi informasi berbasis media sosial. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi dari tiga mitra kerja dengan melibatkan kelompok ekonomi, ilmuwan, dan sipil. Kelompok-kelompok tersebut antara lain Radar Kediri sebagai mitra kerja profesional, STAIN Kediri sebagai fasilitator dan mediator, dan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi’in Lirboyo Kediri sebagai mitra pelaksana kerja. Kegiatan yang dilakukan merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas santri melalui pengembangan jurnalistik warga dalam menyajikan informasi dalam bentuk produk jurnalistik meliputi berita, *features*, opini, dan artikel. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, mentoring, dan pelatihan. Melalui hal itu dihasilkan peningkatan pengetahuan santri tentang berbagai produk jurnalistik, varian informasi, media sosial sebagai bentuk konvergensi media, dan peningkatan kapasitas santri sebagai jurnalis warga yang kritis, peduli, dan responsif terhadap berbagai jenis peristiwa yang terjadi di sekitarnya yang merupakan hal mendasar yang diperlukan dalam kerja jurnalistik.

Kata kunci: jurnalis warga, produk jurnalistik, informasi keagamaan lokal, santri, sosial media

*Dosen Tetap Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Jurusan Ushuluddin STAIN Kediri.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Jurnalisme warga (*citizen journalism*) merupakan aktivitas warga yang memainkan peranan aktif dalam mengumpulkan, menganalisis, melaporkan, dan menyebarkan berita kepada masyarakat luas. Jurnalisme ini merupakan respon dari *market driven journalism* yang memandang masyarakat hanya sebagai obyek pemasaran. Sehingga dalam hal ini masyarakat dipakai sebagai alat untuk menguntungkan kaum pemodal saja dalam industri media. Paling tidak ada dua hal yang dapat dilakukan melalui jurnalisme warga, *pertama*, partisipasi warga dalam membuat berita. Dan yang *kedua*, konten yang dihasilkan merupakan konten dengan memuat *public interest*. Konten yang dimaksud dalam hal ini ialah konten yang menurut mereka penting untuk disampaikan kepada publik. Bahkan bisa jadi konten yang diangkat merupakan konten yang tidak tersampaikan melalui media *mainstream* atau untuk melengkapi konten yang sudah ada. Dalam konteks ini ialah konten yang berkaitan dengan informasi keagamaan dan pesantren yang disampaikan oleh santri tentang berita dan informasi yang dianggap penting yang tidak termuat dalam informasi media utama.

Berdasarkan hasil survei, peneliti menemukan terdapat 3343 berita yang termuat di harian pagi Radar Kediri, tidak lebih dari 10% pemberitaan merupakan berita yang memuat tentang pondok pesantren dan umat Islam. Artinya hanya terdapat 30 sampai 33 berita saja di media massa yang memuat tentang Pondok Pesantren. Termuatnya pemberitaan tentang pesantren dan umat Islam pun belum tentu memuat tentang hal-hal positif yang menyangkut tentang umat Islam.

Berbagai pemberitaan yang kurang menguntungkan umat Islam di atas menjadi perhatian dan cukup mengkhawatirkan. Kekhawatiran akan timbulnya citra negatif terhadap umat muslim dan pondok

pesantren yang lahir dan hidup di Indonesia hingga kini dipandang sebagai salah satu bagian sosial budaya yang tumbuh subur di Indonesia, namun karena pemberitaan tentang terorisme dan radikalisme berbasis pondok pesantren membuat sebagian umat Islam termasuk Pondok Pesantren Lirboyo seringkali menanggapi respon-respon mereka melalui jaringan antar kyai se-Jawa Timur untuk meluruskan kembali peran dan fungsi pondok pesantren yang seharusnya, tidak seperti yang diberitakan di media massa yang beredar di masyarakat.

Jurnalisme warga muncul karena beberapa hal. Salah satunya adalah adanya kekecewaan publik terhadap media *mainstream* yang seringkali mengalami kelunturan idealisme. Hal ini dikarenakan media adalah suatu industri yang sebenarnya juga memiliki kepentingan ekonomi, maka media *mainstream* seringkali terlihat lebih mengedepankan kepentingan ekonomi. Pada titik ini khalayak merasa idealisme media *mainstream* yang diharapkan oleh khalayak dapat berpihak kepada masyarakat luas dan menjunjung kebenaran, lalu menjadi tidak lagi bisa secara konsisten mengusung idealisme tersebut.

Isu radikalisme Islam yang marak dan berkembang di masyarakat saat ini memiliki perhatian besar untuk diliput dan diangkat oleh media massa. Karena isu ini memiliki jumlah peminat yang sangat banyak dan meningkatkan jumlah pemasaran oplah dan rating media industri. Sementara itu, isu-isu keislaman yang mengusung tentang dakwah Islam yang menyangkut tentang budaya, ekonomi, sosial, dan politik Islam kurang menjadi perhatian untuk diliput dan diangkat oleh media khususnya media *mainstream*. Wartawan sering menganggap isu tersebut kurang menarik. Apalagi saat sekarang ini persaingan isu antara politik, pilkada, konflik, dan sebagainya marak sekali dibicarakan dalam media. Padahal sebenarnya isu keislaman dan pesantren yang lain memiliki banyak aspek yang

menarik jika dipandang dari sisi politik, ekonomi, sosial, atau bahkan *human interest*.

Selain itu, publik juga kurang tertarik membaca liputan-liputan tersebut cenderung dipandang menjemukan, berita permukaan, dan tidak menyentuh kepentingan mereka. Hal ini terjadi karena wartawan kurang memahami pengertian dan pentingnya pemahaman Islam secara mendasar yang berkaitan dengan aspek kehidupan di masyarakat sebagai salah satu kekuatan alternatif.

Sebetulnya publik dalam hal ini santri dapat memainkan peran yang lebih besar dalam 'memantau' jalannya sektor sosial keagamaan ini. Jurnalisme warga dan media sosial adalah saluran yang tepat untuk merealisasikan peran ini. Bahkan, peringatan Hari Pers se-Dunia pada 3 Mei 2011 Perserikatan Bangsa-Bangsa menyoroti positif tentang meningkatnya peran media sosial, ponsel, dan internet, dalam menyurakan pandangan rakyat di berbagai negara. Peran jurnalisme warga melalui internet tampak dapat melahirkan perubahan yang besar. Bahkan, menurut beberapa pengamat media internasional, media sosial dan jurnalisme warga memegang peran penting dalam mendokumentasikan gejolak dunia Arab terutama ketika jurnalisme tradisional (*mainstream media*) dibungkam atau kurang dapat menjalankan perannya. Jurnalisme warga tersebut telah menjadi 'mata dan telinga' bagi dunia.

Di Indonesia, tingginya penetrasi telepon seluler menciptakan peluang lebih besar untuk lebih berperannya jurnalisme warga, terutama melalui media sosial (selain youtube, tentunya dapat juga menggunakan facebook, twitter, dan juga sms atau BBM bagi pengguna blackberry). Begitu sederhananya proses penyebarluasan informasi dengan ponsel dan media sosial ini sehingga suatu peristiwa atau permasalahan dapat diangkat sesegera mungkin ke ruang publik.

Selain di media sosial yang berbasis internet dan telepon genggam, jurnalisme

warga juga tentunya dapat disalurkan melalui media konvensional, seperti: selebaran dan majalah dinding serta siaran radio atau via pendekatan pencerita/*story teller* yang dapat lebih efektif menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat yang masih mendapat kesulitan dalam kemampuan baca tulis.

Jika hal ini dapat dilakukan sebagai upaya counter opini, tentunya akan semakin mempercepat terjadinya perbaikan pelayanan melalui proses keterbukaan informasi publik yang dihasilkan santri sebagai representasi dari publik itu sendiri melalui jurnalisme warga. Namun tentunya, informasi yang kita inginkan muncul di ruang publik itu tidak sekedar keluh kesah atau bahkan caci maki yang semuanya berujung pada opini pribadi bukan sesuatu yang faktual (berdasarkan fakta) dan ini bukan menjadi bagian dari jurnalisme. Sebab, makna secara umum kata 'jurnal' adalah catatan peristiwa, bukan catatan opini. Maka opini pribadi bukanlah karya jurnalisme warga. Jika kita ingin menulis tentang opini tapi dalam format jurnalisme warga, wawancarailah orang lain, bukan dengan menulis opini pribadi kita. Oh karena itu, untuk mencapai tingkatan kecakapan seperti bagaimana mewawancarai narasumber, juga dalam hal melakukan riset liputan sederhana dan observasi di lapangan, jurnalisme warga perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan praktis yang cukup mumpuni.

Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang melibatkan peran partisipasi aktif masyarakat untuk turut serta memasuki ruang-ruang publik masyarakat sebagai upaya counter opini sebagai bentuk penyeimbang berbagai informasi yang kurang menguntungkan. Selama ini, dominasi oleh media *mainstream* (media utama) yang mengindustri yang dimiliki oleh perusahaan kapital besar dengan tujuan memperoleh keuntungan melalui komodifikasi informasi yang mereka sajikan untuk publik.

Praktik jurnalisme warga adalah murni aktivitas khalayak yang tidak dikendalikan oleh pihak manapun. Dengan demikian, semua kegiatan jurnalistik untuk mencari, mengumpulkan, melaporkan, menganalisa, menyebarkan informasi dan berita, dan dilakukan secara mandiri. Produk yang dihasilkan pun berdasarkan atas kebebasan penuh dan sangat independen. Akhirnya, hal ini tidak memiliki batasan baku untuk para pelaku jurnalisme warga yang dilakukan oleh santri dalam mengolah suatu informasi atau membuat suatu berita. Peranan jurnalisme warga ini dapat dilakukan oleh masyarakat sipil untuk melakukan fungsi pengawasan sosial dalam masyarakat. Termasuk dalam hal ini adalah santri, terutama keterlibatan mereka dalam menulis pemberitaan untuk publik. Termasuk berita-berita Keislaman dan Pondok Pesantren.

Keterlibatan ini membutuhkan pendampingan dikarenakan santri yang memiliki kapasitas terbatas. Keterbatasan tersebut meliputi lemahnya kemampuan jurnalisme santri, lemahnya keterampilan menyajikan berita, mengingat sumberdaya santri bukan berlatar belakang pendidikan jurnalistik murni. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama multipihak untuk meningkatkan kapasitas santri agar dapat melakukan kegiatan jurnalisme warga ini. Kerjasama multipihak ini terdiri dari institusi perguruan tinggi dan kaum jurnalistik profesional.

Hidayatul Muhtadi'in atau sering disingkat HM Lirboyo merupakan salah satu Pondok Pesantren terbesar yang tumbuh dan berkembang di Kediri. Berdiri sejak tahun 1925 oleh KH. Abdul Karim. Pondok Pesantren ini memiliki santri sebanyak 18.000 orang yang berasal dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Yang menjadi ciri khas sekaligus identitas Pondok Pesantren ini ialah sistem pembelajaran salaf dengan metode tradisional dan klasikal, diantaranya adalah dengan memakai metode pengajaran *weton sorogandan bandongan*. Meskipun telah terdapat beberapa saluran komunikasi

yang berkaitan dengan sosialisasi kegiatan pondok yang dikelola oleh para santri sebagai bentuk komunikasi mereka dengan masyarakat di luar pondok. Saluran-saluran komunikasi tersebut meliputi: televisi, radio, majalah, buletin, blog, website. Dan ditambah saluran komunikasi internal yang terdiri dari mading dan buletin yang beredar di kalangan para santri.

Berdasarkan pada gambaran situasi tersebut di atas, maka pengabdian masyarakat berbasis riset ini difokuskan untuk meningkatkan kapasitas santri untuk memiliki jiwa yang kritis, memiliki rasa ingin tahu, dan peduli terhadap berbagai peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Pendekatan jurnalisme warga sengaja diambil oleh peneliti sebagai upaya pemberdayaan masyarakat sipil dalam hal ini komunitas santri untuk memiliki peran menyuarakan keragaman informasi berbasis isu-isu keagamaan dan pesantren. Dengan kata lain keikutsertaan santri dalam hal ini ialah menyajikan informasi dengan mempertimbangkan *cover both side* dan kode etik jurnalistik.

Fokus Penelitian

Berdasarkan beberapa kajian di atas, fokus penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman santri tentang arti penting kolaborasi kelompok-kelompok di masyarakat yang meliputi kelompok ekonomi, perguruan tinggi, dan sipil agar mereka dapat membentuk informasi keagamaan lokal secara objektif, lengkap, dan akurat ?
2. Bagaimana meningkatkan kapasitas santri untuk dapat membuat produk jurnalistik meliputi berita, features, opini, dan artikel sesuai tata aturan dan kode etik jurnalistik?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini ialah :

1. Meningkatkan pemahaman santri tentang arti penting kolaborasi

kelompok-kelompok di masyarakat yang meliputi kelompok ekonomi, perguruan tinggi, dan sipil agar mereka dapat membentuk informasi keagamaan lokal secara objektif, lengkap dan akurat.

2. Meningkatkan kapasitas santri untuk dapat membuat produk jurnalistik meliputi berita, features, opini, dan artikel sesuai tata aturan dan kode etik jurnalistik.

Kepustakaan

Jurnalisme Warga (*Citizen Journalism*) Berbasis Santri

Lima ratus tahun sudah pondok pesantren hidup sebagai lembaga pendidikan Islam di Jawa. Mulai saat itu, pesantren yang telah kita kenal saat ini mengalami banyak perubahan dan memainkan berbagai macam peran dalam sejarah bangsa Indonesia. Sejak bom yang meledakkan WTC September 2002 dan kasus bom Bali I dan II terjadi di Indonesia, maka sejak itulah pondok pesantren di Indonesia mendapatkan sorotan tajam. Terungkapnya Abu Bakar Ba'asyir, Imam Samudra, Amrozi, dan Hambali sebagai otak pelaku dan sejumlah aksi terorisme di Indonesia. Hal ini terjadi dikarenakan nama-nama tersebut merupakan jebolan, bahkan pendiri pondok pesantren. Baru-baru inipun yang tak kalah marak dibicarakan ialah munculnya gerakan ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*). Berita-berita yang mengandung unsur kekerasan, sensasional, dan memiliki nilai jual semacam inilah yang sering menghiasi industri media saat mereka membahas tentang umat Islam dan pondok pesantren. Hal tersebut acapkali merugikan kepentingan umat Islam dan citra Islam di depan publik. Pondok pesantren dituding memainkan peran sebagai lembaga pendidikan yang mengajarkan ajaran Islam ekstrim. Atau bahkan, seringkali pondok pesantren dipandang sebagai lembaga tradisional, anti modern, terbelakang, dan tidak memiliki respon positif terhadap teknologi (gaptek).

Unsur-unsur kunci Islam tradisional adalah lembaga pesantren sendiri, peranan dan kepribadian kiai (*ajengan, tuan guru, dan lain sebagainya tergantung daerahnya*) yang sangat menentukan dan karismatik-karismatik persis sebagaimana dalam pengertian Weberian. Sikap hormat, takzim dan kepatuhan mutlak kepada kiai adalah salah satu nilai pertama yang ditanamkan pada setiap santri. Kepatuhan itu diperlukan lagi, sehingga mencakup penghormatan kepada para ulama sebelumnya dan, *a fortiori*, ulama yang mengarang kitab-kitab yang dipelajarinya. Kepatuhan ini, bagi pengamat luar, tampak lebih dominan.

Media mampu melahirkan berbagai produk media sosial yang efektif dalam kehidupan komunikasi politik keagamaan di masyarakat. Dalam konteks lokal, media lazim digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu alat demokrasi yang efektif. Media digunakan sebagai saluran yang menghubungkan berbagai kepentingan politik baik secara vertikal maupun horisontal. Media menjadi wadah atau tempat untuk bertemunya berbagai pelaku politik, baik rakyat, politisi, maupun penguasa. Dalam kerangka ini, para pelaku media lokal secara teratur dan sadar menghitung hasil yang diharapkan melalui langkah-langkah politiknya, sehingga dengan demikian dapat diketahui bahwa dalam komunikasi politik lokal, para politisi merupakan pelaku komunikasi yang aktif menjalankan kegiatan-kegiatan politiknya, salah satunya melalui media.

Sementara itu, jurnalis yang pekerjaannya membuat materi berita atau konten dalam media, memiliki kepentingan yang akan menguntungkan medianya. Dengan demikian petanya adalah bahwa penguasa, jurnalis dan khalayak berperilaku mencerminkan tujuan dan kepentingan masing-masing, karena sudah menjadi suatu prinsip yang umum bahwa dalam mengejar berbagai tujuan, setiap individu akan memperhitungkan setiap perilaku

yang berorientasi pada tujuan individu yang bersangkutan. Prinsip-prinsip berdasarkan orientasi ini akan berlaku juga pada media-media *mainstream* (Zaller, 1999).

Peran aktif para jurnalis adalah melakukan kegiatan jurnalistik yaitu mencari, mengolah, dan menyiarkan informasi. Sementara sejalan dengan percepatan teknologi, aktivitas jurnalistik ini bisa juga dilakukan oleh masyarakat umum. Mereka mencari, mengolah informasi dan membagikannya secara luas kepada masyarakat umum lainnya. Bahkan ada yang secara teratur dan melakukannya sebagai kegiatan harian. Dalam *social context* konsumsi media cenderung mengkonseptualisasikan media sebagai representasi daripada sebagai sumber informasi. Media terintegrasi ke dalam kehidupan sosial seseorang setiap harinya (Jensen, 2002).

Fenomena tersebut kemudian disebut sebagai jurnalistik warga, sering juga disebut *Citizen journalism*, *Participatory Journalism*, atau *Public Journalism*. *Citizen journalism* atau jurnalistik warga kegiatan masyarakat yang “berperan aktif dalam proses mengumpulkan, melaporkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi dan berita”. Intensitas dari partisipasi ini adalah untuk menyediakan informasi yang independen, akurat, relevan yang mewujudkan demokrasi (Rosen, J. Et al, 1997). Shayne Bowman dan Chris Willis lantas mendefinisikan *citizen journalism* sebagai ‘...the act of citizens playing an active role in the process of collecting, reporting, analyzing, and disseminating news and information.’

Jurnalistik Warga Sebagai Kolaborasi Masyarakat Ekonomi, Pendidikan Tinggi, dan Sipil

Gramsci mengidentifikasi terdapat tiga kelompok masyarakat yaitu masyarakat ekonomi, politik dan sipil. Ketiga kelompok masyarakat tersebut memiliki orientasi yang berbeda (Bocock, 2007: 27). Keberadaan ketiga pilar masyarakat itu juga diakui

oleh Robert Wunthow yang antara lain mengemukakan bahwa seluruh masyarakat itu dibagi menjadi tiga pilar, yaitu swasta atau pasar (masyarakat ekonomi/ business), negara atau masyarakat politik (masyarakat politik, *government*) dan voluntir yang disebut juga pilar/sektor ketiga (masyarakat sipil, *civil society*) (Sujatmiko, 2003: 45).

Gramsci, dalam kajiannya tentang hegemoni, mengidentifikasi tiga bidang yang berbeda dalam suatu masyarakat, yaitu perekonomian (masyarakat ekonomi), negara (masyarakat politik), dan masyarakat sipil (Bocock, 2007: 27). Ketiga kelompok masyarakat tersebut memiliki orientasi yang berbeda dan sangat esensial bagi berfungsinya masyarakat. Dengan demikian, keberadaan masyarakat ekonomi sangat penting adanya dalam dinamika suatu masyarakat. “Masyarakat ekonomi” adalah istilah yang digunakan untuk mendefinisikan bentuk dominan dalam suatu wilayah pada suatu waktu yang di dalamnya terdiri dari sarana teknis produksi dan hubungan-hubungan sosial produksi yang dibangun berdasarkan suatu pembedaan yang di dalamnya kelas-kelas dikaitkan dengan kepentingan kepemilikan sarana produksi, baik sebagai pemilik substansial atau sebagai bukan pemilik yang dipekerjakan dalam organisasi yang dikaitkan dengan produksi. Pilar utama sektor ini (masyarakat ekonomi) adalah perusahaan-perusahaan, termasuk industri-industri media. Nilai utama sektor swasta adalah mekanisme pasar untuk mendapatkan keuntungan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa masyarakat ekonomi adalah suatu sistem sosial yang di dalamnya tercakup berbagai subsistem yang berfungsi memproduksi dan memasarkan barang, jasa dan atau informasi yang dikomodifikasikan melalui mekanisme pasar untuk mendapatkan keuntungan.

Political society adalah masyarakat yang mulai mengenal arti politik sebagai otoritas sehingga tercipta aturan dan hukum, serta cenderung menjadi satu tatanan sosial yang

berbasis pada adanya supremasi kekerasan. Jika dalam masyarakat natural kekuasaan tidak pernah diorganisir dan dilembagakan, maka dalam masyarakat politik, kekuasaan itu mulai dilembagakan dalam suatu organisasi yang kemudian disebut dengan negara. Negara atau masyarakat politik terdiri atas sarana kekerasan (polisi dan militer) dan suatu wilayah tertentu, bersama dengan pelbagai birokrasi yang didanai oleh negara (pamong praja/lembaga pemerintah, pelbagai lembaga hukum, kesejahteraan dan pendidikan) (Bocock, 2007: 34-35). Pilar-pilar utama sektor negara (masyarakat politik) adalah lembaga-lembaga kenegaraan seperti parlemen, pemerintah, dan lembaga pengadilan. Di sektor negara berlaku prinsip kekuasaan yang memaksa. Bahkan oleh Louis Althusser (2006: 14), negara dipandang sebagai suatu kekuatan eksekusi dan intervensi represif, untuk kepentingan kelas penguasa. Karena kemampuannya yang khas untuk menerapkan ancaman yang sah atau paksaan, masyarakat politik memiliki keunggulan yang wajar di antara ketiga sektor dalam menjaga ketertiban umum, keamanan, dan kesejahteraan masyarakatnya (Korten, 1993: 159). Namun, bagi Gramsci, negara dalam memperjuangkan legitimasi kekuasaannya dari massa tidak harus selalu melalui paksaan. Untuk itu, kelompok berkuasa harus mampu membuat kelompok atau massa lain menerima dan menginternalisasi prinsip-prinsip, ide-ide dan norma/ nilai sebagai milik mereka juga. Pendek kata, hegemoni itu harus diraih melalui upaya politis, kultural, dan intelektual (Sugiono, 1999: 40-41).

Masyarakat sipil merupakan pilar ketiga yang di dalamnya mencakup LSM, organisasi masyarakat, pondok pesantren, atau lembaga gerakan masyarakat baru. Pada masyarakat sipil, berlakunilai-nilai kesukarelaan, dengan modal sosial sebagai elemen dasarnya. *Civil society* adalah bentuk masyarakat yang merupakan gugatan terhadap superioritas dari negara, dalam rangka menghormati dan

melindungi hak-hak dasar/hak asasi manusia (Setiawan, 1996: 51). Sehubungan dengan hal itulah, dinyatakan bahwa masyarakat sipil merupakan jaringan yang kuat di antara lembaga-lembaga, seperti agama, keluarga, klub, bengkel kerja, asosiasi, dan komunitas yang berada di antara negara dan individu, dan pada saat yang bersamaan menghubungkan individu dengan otoritas, serta menjaga individu dari kontrol politik yang bersifat total (Tunmer, 2006: 62).

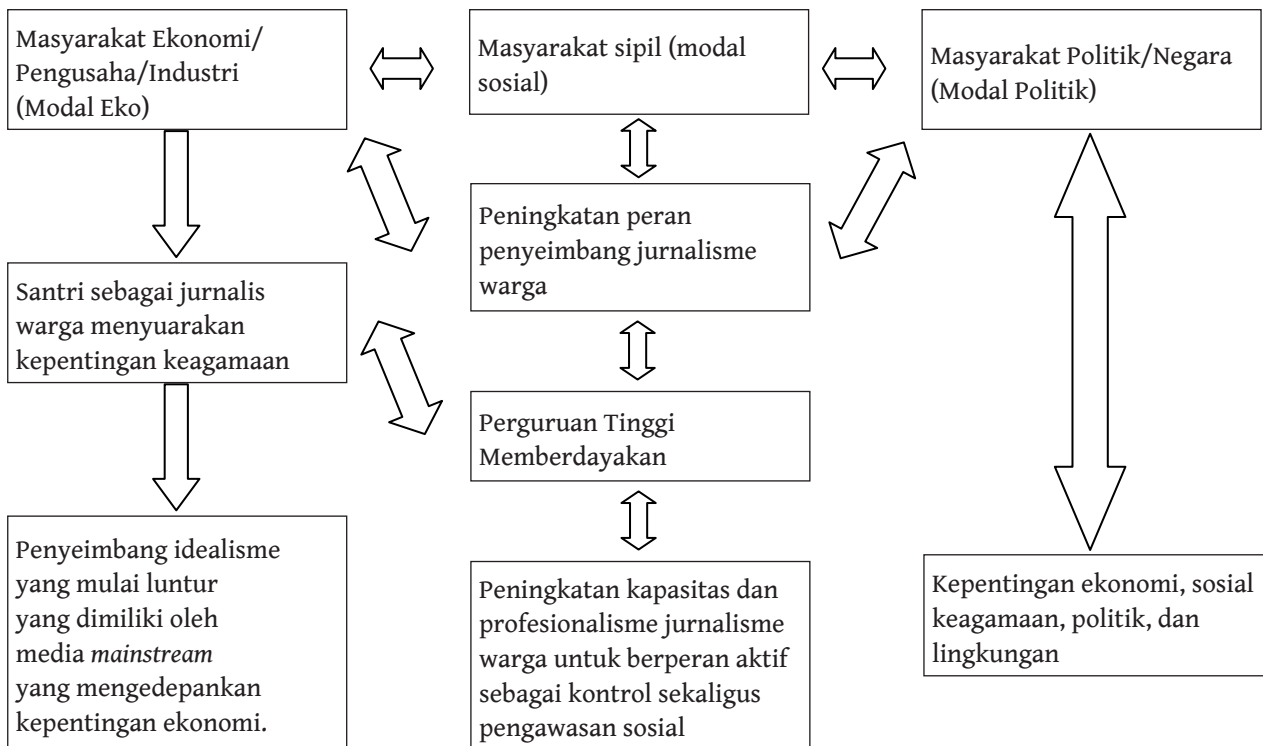
Rajesh Tandon menyatakan masyarakat sipil terdiri dari tiga unsur. Pertama, ada basis material sumber daya untuk pemanfaatan produktif. Kedua, ada basis institusional dari kelompok-kelompok atau asosiasi, serta inisiatif untuk mengelola masyarakat sipil. Ketiga, ada basis idiologis dari nilai, norma dan ideal yang menyediakan legitimasi dari *government* (Setiawan, 1996: 51). Dalam konteks interaksi antara ketiga unsur itulah pembahasan masyarakat sipil menjadi sangat penting, karena, pada saat yang sama, masyarakat sipil harus berhadapan dengan dua entitas lainnya, yakni realitas masyarakat ekonomi/pasar, pengusaha, dan masyarakat politik/negara (Giddens, 2002:90-92).

Ketiga pilar tersebut secara ideal mesti tumbuh dalam sebuah kekuatan yang saling mengimbangi, saling mengontrol, saling memberi, saling menopang, dan pada akhirnya memberikan sinergi untuk memajukan keadaban. Kondisi ideal semacam itu sering dalam kenyataannya tidak seindah dalam guratan teks. Bahkan tidak jarang dalam kondisi masyarakat sipil yang lemah, negara yang otoritarian berkomplot dengan mekanisme pasar. Hal ini tentu akan mengakibatkan relasi tiga pilar menjadi timpang (Wiratmoko, 2005: xxv). Dalam kondisi semacam itu, kekerasan fisik, simbolik, dominasi dan hegemoni dipertunjukkan oleh negara untuk menekan masyarakat sipil.

Oleh karena itulah, menurut Paine, perlu dibatasi campur tangan kekuasaan

negara ke dalam wilayah masyarakat sipil, agar setiap individu di dalam masyarakat saling berinteraksi secara kompetitif dan membangun solidaritas berdasarkan kepentingan timbal-balik serta tujuan bersama. Legitimasi kekuasaan negara didasarkan pada keinginan masyarakat untuk mencapai kepentingan bersama (Keane, 1988). Dalam konteks inilah, perbedaan dengan menggunakan teori semiotika, dekonstruksi, etnografi dan geneologis sangat penting artinya karena kolaborasi di antara tiga pilar yang memiliki karakter dan kepentingan yang berbeda cenderung melakukan proses produksi, manipulasi

politik, bahkan tidak tertutup kemungkinan modal tubuh yang dimilikinya. Hal ini tidak jarang mengakibatkan terjadinya konflik dalam masyarakat. Untuk menghindari terjadinya konflik antarkelompok masyarakat, maka setiap masyarakat mengupayakan penginvestasian modal sosial dan pengembangan model kontrol sosial. Maka dari sinilah maka perguruan tinggi sebagai bagian dari masyarakat sipil yang merupakan bagian dari modal sosial memiliki peran dalam memberdayakan masyarakat menuju keberimbangan informasi yang seharusnya diterima oleh masyarakat secara memadai tanpa terjadi ketimpangan.



Gambar 1. (Dimodifikasi dari Kusnadi, 2003, dalam Mudana, 2012).

teks untuk menyelubungi berbagai hawa nafsu dan kepentingannya. Dalam setiap komunitas, selalu akan dijumpai keberadaan masyarakat ekonomi, politik dan sipil. Ketiga kelompok masyarakat tersebut mempermainkan berbagai modal yang ada dalam suatu komunitas untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya.

Modal yang dipergunakan pada berbagai arena sosial mencakup modal ekonomi, modal sumber daya manusia, modal natural, modal

Metode Penelitian

Khalayak yang dijadikan sasaran pada kegiatan P3M ini adalah santri-santri di Pondok Pesantren Lirboyo. Terdiri dari Pondok Induk Putra Hidayatul Muftadi'in dan Pondok Unit yang berada di bawah koordinasi Bidang Pramuka. Yang terdiri dari 20 orang peserta santri, terdiri dari santri Tsanawiyah dan Aliyah.

Pendekatan yang dilakukan dalam pengabdian masyarakat berbasis riset ini ialah

pendekatan kualitatif, yakni metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang—oleh sejumlah individu atau sekelompok orang—dianggap berasal dari masalah social atau kemanusiaan. Penggalan data diperoleh melalui teknik *focus group discussion* (fgd) dan wawancara. Data yang diperoleh dari hasil curah pendapat dan wawancara

Masalah pokok yang akan dipecahkan dalam kegiatan pengabdian P3M ini berkaitan dengan kekurangpahaman santri atau pondok pesantren terhadap arti pentingnya kolaborasi dengan masyarakat ekonomi, perguruan tinggi, dan sipil, kekurangpahaman tentang pembuatan produk jurnalistik sesuai dengan tata aturan

dan kode etik jurnalistik, kekurangpahaman santri tentang arti penting saluran-saluran komunikasi serta peran serta mereka di ruang-ruang publik secara deliberatif, dan kurangnya motivasi santri untuk berperan serta dalam melakukan pengawasan sosial sebagai elemen masyarakat sipil untuk melaporkan kejadian yang terdapat di sekitarnya. Hal ini berkaitan dengan peran jurnalisisme untuk membuat *noising* agar dapat membangun opini tentang pandangan yang lebih positif tentang Islam dan pesantren melalui pembentukan opini secara terus-menerus. Berbagai alternatif untuk memecahkan permasalahan tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Alternatif Pemecahan Masalah

No.	Permasalahan	Akar masalah	Strategi pemecahan masalah
1.	Santri kurang memahami pentingnya menjadi jurnalis yang melakukan peran kontrol dan pengawasan sosial terhadap informasi keagamaan dan pesantren untuk pengembangan <i>public sphere</i> yang sehat	- Kurangnya informasi dan pengetahuan tentang peran dan fungsi jurnalis untuk membangun <i>public sphere</i>	1. Penyebaran informasi 2. Pemberian ceramah dan diskusi 3. Pelatihan jurnalistik
2.	Santri kurang memahami tentang realitas media dan objektivitas	- Kurang informasi dan pengetahuan tentang peran media dan membangun objektivitas informasi	1. Pemberian informasi tentang objektivitas 2. Pemberian ceramah dan diskusi 3. Pemberian workshop peran media
3.	Santri kurang memahami tentang beberapa produk jurnalistik antara lain : berita, feature, opini, dan berita sesuai kode etik jurnalistik	- Kurang memahami tentang produk jurnalistik yang terdiri dari berita, feature, opini, dan artikel sesuai kode jurnalistik	1. Pelatihan jurnalisisme warga yang meliputi berita dan feature (hard news dan soft news) 2. Pelatihan penulisan opini dan artikel 3. Pemberian informasi tentang kode etik jurnalistik
4.	Santri kurang mengerti perannya dalam ruang-ruang publik dalam berkolaborasi dengan masyarakat ekonomi dan perguruan tinggi	- Kurang memahami peran di ruang publik dan kerjasama dengan masyarakat sipil dan perguruan tinggi	1. Pemberian informasi dan diskusi
5.	Santri kurang memahami perannya sebagai pengawas sosial untuk melaporkan peristiwa di sekitarnya melalui jurnalisisme warga	- Kurang informasi tentang peran pengawasan sosial dan melaporkan peristiwa yang terjadi di sekitarnya	1. Pemberian informasi dan ceramah mengenai peran pengawasan sosial

Berdasarkan rumusan alternatif pemecahan masalah dalam tabel di atas solusi yang dipilih untuk memecahkan permasalahan tersebut adalah: koordinasi, konsolidasi, pemberian ceramah, diskusi, dan pelatihan.

Evaluasi

Evaluasi kegiatan ini dilakukan terhadap proses dan produk kegiatan pada ceramah dan diskusi meningkatkan pemahaman santri sebagai masyarakat sipil untuk berperan di ruang publik melalui jurnalisme warga dengan berkolaborasi dengan masyarakat ekonomi dan perguruan tinggi, evaluasi prosesnya adalah aktivitas santri dan pengurus pondok pesantren (mengajukan pertanyaan, tanggapan, dan semangat peserta) dalam mengikuti diskusi. Pada ceramah dan pelatihan meningkatkan kapasitas santri membuat produk jurnalistik yang terdiri dari berita, *features*, opini, dan artikel, evaluasi prosesnya adalah aktivitas kerja peserta membuat produk jurnalistik yang menandakan adanya keterlibatannya dalam mengikuti ceramah dan diskusi, sedangkan evaluasi produknya berupa peningkatan wawasan dan kemampuan santri membuat berita, *features*, opini, dan artikel dan sikap santri yang makin kritis dalam membuat *noising* agar opini publik terbentuk. Sementara itu, pada tujuan meningkatkan motivasi santri untuk berperan serta dalam melakukan pengawasan sosial sebagai elemen masyarakat sipil untuk melaporkan kejadian yang terdapat di sekitarnya, evaluasi prosesnya adalah berkaitan dengan partisipasi santri membuat produk jurnalistik melalui banyak pertanyaan dan semangat mereka dari waktu ke waktu dalam mengikuti kegiatan, sedangkan evaluasi produknya meningkatnya kualitas tulisan santri dalam menulis dan keterampilan mereka menuangkan ide dan gagasan dalam bentuk tulisan melalui blog *santrizen journalism* dan media-media sosial

lainnya yang telah disediakan oleh pondok pesantren.

Pembahasan

Kegiatan pengabdian masyarakat berbasis riset ini dilaksanakan dalam dua tahap yaitu: 1) dialog dan pelatihan peningkatan kapasitas santri mengembangkan komunikasi keagamaan lokal melalui *citizen journalism*, 2) mentoring penguatan kapasitas santri pasca pelatihan dialog pengembangan wawasan tentang arti pentingnya berkolaborasi dengan masyarakat ekonomi, ilmuwan dan sipil dalam pengembangan kerjasama pembuatan produk jurnalistik, yang terdiri dari *berita, feature, artikel, dan opini*.

Dari hasil pelatihan pertemuan pertama tim peneliti membandingkan sebelum pelatihan dan sesudah pelatihan dengan cara memberikan daftar isian atau kuisisioner kepada peserta. Hal ini memungkinkan peneliti mengetahui sampai sejauh mana pengetahuan yang dimiliki peserta dan seberapa efektif pelatihan terhadap peningkatan kapasitas peserta.

Sebelum pelatihan peserta kurang memahami tentang arti penting kolaborasi masyarakat ekonomi, perguruan tinggi, dan pesantren dalam hal peningkatan komunikasi keagamaan lokal khususnya di Kota Kediri. Di samping itu, pengetahuan mereka akan teknik observasi, wawancara, data dan fakta sebagai penyusun berita juga masih cenderung kurang bahkan ada yang tidak paham sama sekali. Akan tetapi, setelah pelatihan dan mentoring dilaksanakan kemampuan mereka mengalami peningkatan. Mereka menjadi paham akan pentingnya kerjasama kolaborasi tiga elemen dalam masyarakat untuk membangun *noising*, *noising* ini dibutuhkan untuk membangun opini terus menerus di dalam masyarakat sehingga membentuk pengetahuan baru di masyarakat tentang dakwah Islam dan sosialisasi pesantren di Kediri.

Beberapa hal yang didapati mengalami kekurangan yang didapatkan dari peserta atas pelatihan ini antara lain : **pertama**, menambah informasi tentang kode etik jurnalistik untuk penulisan karya berita baik dalam bentuk *hard news* maupun *soft news*, yang meliputi kode etik jurnalistik, Undang-Undang Pers No. 40 tahun 1999, dan Undang-Undang Informasi Publik. **Kedua**, memberikan pengetahuan tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tahun 2014. **Ketiga**, memberikan lebih banyak informasi tentang teknis menuangkan ide dan gagasan ke dalam tulisan yang berasal dari peristiwa di sekitar santri mengingat keterbatasan mereka keluar dari lingkungan pondok pesantren. Serta cara tips untuk memberikan penguatan tulisan dengan memberikan lebih banyak data dan fakta dari sebuah tulisan baik itu berupa opini maupun artikel.

Setelah mengikuti pelatihan selama dua hari tidak secara otomatis eks-peserta pelatihan dapat langsung mempraktikkan teori yang diterima serta dapat memproduksi konten jurnalistik.

Secara umum gambaran para eks-peserta pelatihan jurnalistik warga yang ditemui adalah “kebingungan” dan “kegamangan” dalam melakukan kerja jurnalistik. Alhasil mereka mengalami kesulitan saat mulai menyusun tulisan atau produk jurnalistik seperti yang diharapkan. Beberapa penjelasan yang didapat saat berdialog dengan mereka antara lain disebabkan :

- a. Keraguan untuk menulis, karena belum memiliki keberanian untuk memulai.
- b. Eks-peserta pelatihan ragu-ragu dan tidak memahami benar apa isu yang perlu dan harus diangkat.
- c. Ada kekuatiran jika tulisan yang diangkat akan menimbulkan protes pihak-pihak tertentu, karena jurnalis warga sampai saat ini masih belum memiliki ‘identitas’ yang cukup jelas.
- d. Merasa seperti ada beban untuk mengungkapkan sesuatu yang kritikal

(mengkritik suatu kondisi dari realitas keagamaan dan pesantren secara umum).

Oleh karenanya, perlu dilakukan pendampingan terhadap eks-peserta untuk menjadi jurnalis warga agar mereka dapat menghasilkan tulisan atau produk jurnalistik. Sehingga hasil akhir yang diharapkan adalah kefasihan para eks-peserta pelatihan jurnalisme warga untuk memproduksi konten jurnalistik yang didasari oleh pemahaman teknis penulisan dan jurnalistik serta isu yang akan diangkat.

Perlu diuraikan pendampingan terhadap jurnalisme warga berbasis santri tentang apa saja prasyarat yang diperlukan dan harus dipenuhi di dalam diri fasilitator. Fasilitator yang dimaksud ialah tim mitra pelaksana media. Selanjutnya, akan dijelaskan pula pola pendampingan yang dikembangkan melalui tiga jenis interaksi antara mitra pelaksana media dengan jurnalis warga, yaitu :

- a. Pertemuan regular minimal sebulan sekali selama tiga bulan.
- b. Interaksi melalui akun media sosial (melalui blog: santrizenjournalism.com).
- c. Interaksi langsung di dalam proses penyuntingan produk jurnalistik (dilakukan oleh fasilitator setiap dua minggu sekali selama dua bulan).

Kegiatan jurnalistik dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 adalah kegiatan mencari, menghimpun, dan menyiarkan berita melalui media massa. Pola ini merupakan pola kerja yang dilakukan oleh setiap media yang berbasis jurnalistik warga (*citizen journalism*), mulai dari tahap perencanaan, tahap peliputan, hingga tahap penyusunan laporan berita. Pada tahapan pembahasan ini dibagi menjadi tiga, yakni : tahap persiapan materi, tahap sebaran dan pembentukan, dan tahap konfirmasi pemberitaan.

Tahap Persiapan Materi

Proses persiapan materi jurnalistik warga berbasis santri berlangsung sejak dalam proses perencanaan berita. Didahului dengan rapat redaksi hingga proses penyusunan berita melalui peliputan dan penulisan. Misalnya, saat peserta berkehendak mengangkat berita tentang peristiwa gerakan ISIS yang menjadi incaran Densus 88 yang mengintai beberapa pesantren yang dicurigai sebagai sarang gerakan radikal terjadi sejak 29 Agustus 2014. Hal ini menjadi pertimbangan dalam rapat perencanaan redaksi sebagai bentuk reaksi mereka terhadap pemberitaan negatif tentang pesantren.

Santri yang berpartisipasi dalam jurnalistik warga melihat peristiwa ini memiliki nilai berita yang tinggi. Aspek nilai-nilai berita dipertimbangkan untuk isu ini diantaranya adalah kehangatan (aktualitas), *magnitude*, eksklusif, sudut pandang lain, dramatis dan misi. Menurut Muhammad Al-Faris salah satu partisipan, upaya meluruskan pemberitaan negatif Islam melalui pemberitaan tentang gerakan ISIS dengan memberikan informasi yang benar tentang sejarah ISIS, latar belakang terbentuknya gerakan ini, misinya dan bagaimana gerakan ini disebarluaskan merupakan upaya meluruskan citra buruk Islam itu sendiri. Serta informasi akurat tentang peran dan fungsi pesantren sebagai lembaga sosial di masyarakat diharapkan dapat menjawab kekhawatiran masyarakat tentang pesantren sebagai sarang teroris. Peristiwa di pedalaman Bima di tahun 2011 merupakan pesantren yang tidak pernah menjadi sorotan sebelumnya, ternyata diam-diam pengajarnya merupakan perakit bom. Hal ini dikhawatirkan pula, ia juga mengajarkan hal tersebut kepada para santri. Berita-berita yang menyudutkan umat Islam semacam ini, menurut Muhammad Al-Faris memiliki nilai berita yang tinggi bahkan mampu menembus ke dalam rubrik-rubrik besar dan dapat menjadi prioritas majalah-majalah *mainstream* lainnya. Muhammad Al-

Faris mengatakan :

“Sajian utama jurnalistik warga dari santri ini selalu berasal dari isu-isu keagamaan yang berkaitan dengan syari’ah dan muamalah sebagai ikhtiar syiar Islam dan dakwah, maka sebagai warga masyarakat yang turut prihatin dengan pemberitaan yang menyudutkan umat Islam dan pesantren, maka kompartemen pemberitaan yang berkembang di sini berisi berita-berita yang mengandung nilai dakwah.”

Media bagaimana pun memiliki kewajiban mengusung misi tanggung jawab sosial dan mengutamakan nilai-nilai berita, yang menjadi tujuan akhir bagaimana menghasilkan berita tidak semata-mata memiliki nilai jual, agar media tetap laku di pasaran. Berita berkualitas harus memenuhi ciri-ciri tertentu. Komponen kriteria layak siar bagi jurnalistik warga berbasis santri antara lain : informasi, mengandung syi’ar Islam berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis, relevan, *angle* (sudut pandang) lain, *magnitude*, *trend* baru, misi dakwah ke-Islaman, tokoh dan partisipan. Sementara itu, unsur-unsur sajian utama dalam pemberitaan di antaranya adalah unsur aktualitas dan keberimbangan yang menawarkan sudut pandang lain dari peristiwa tersebut.

Dalam tahap persiapan ini jurnalistik warga berbasis santri memiliki keberpihakan kepada masyarakat (muslim) dan kepentingan umum. Dalam mempersiapkan berita tentang gerakan ISIS, mereka memperhitungkan tentang keberpihakan terhadap isu yang diusung dan digunakan untuk siapa isu tersebut. Jadi, dalam tahap persiapan mereka memiliki kepentingan terhadap umat Islam namun tetap memiliki pertimbangan-pertimbangan kualitas dan nilai berita yang berlaku di dunia jurnalistik.

Berikut ini adalah uraian tahapan kegiatan jurnalistik warga berbasis santri yang dilakukan selama melakukan proses pembentukan berita:

Tahap Sebaran dan Pembentukan

Cakupan isu yang di-upload melalui jaringan media sosial dan website Pondok Pesantren Lirboyo mulai dari isu-isu ke-Islam-an hingga isu-isu nasional dan internasional yang berkaitan dengan dakwah Islam. Dengan menggunakan rujukan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, tetapi juga menggunakan bahasa yang berkesan hidup, lentur, bergerak lincah di tengah masyarakat pembaca. Sumadiria mengungkapkan bahwa setiap surat kabar harian atau mingguan yang dikelola secara profesional serta memiliki kredibilitas dan reputasi tinggi di mata masyarakat, pasti memberi tempat yang layak bagi *feature*.¹

Gaya tulisan bertutur (*feature writing*) selain memberikan informasi serta makna suatu peristiwa, juga sebagai sarana ekspresi paling efektif dalam mempengaruhi khalayak. Kedudukannya tidak hanya untuk memenuhi aspek kesemestaan media massa, lebih dari itu, *feature* sekaligus diharapkan dapat meningkatkan citra media di mata masyarakat.

Pada umumnya sebaran media massa menggunakan model satu arah, di mana media menyodorkan informasi, sementara konsumen media tidak memiliki pilihan lain kecuali mengkonsumsi informasi itu. Salah satu ciri komunikasi massa adalah adanya umpan balik tertunda (*delayed feedback*). Jurnalisme warga berbasis santri berupaya memberikan perimbangan informasi bagi pembacanya dengan memberikan sudut pandang berlainan dari pemberitaan lainnya. Himbauan dari Al-Muttaqin yang tidak puas atas pemberitaan dari media umum dan menghendaki adanya upaya mengembalikan Islam pada Al-Qur'an dan Hadis, serta memberikan informasi yang bermanfaat bagi umat, merupakan umpan balik yang

¹Karya dalam bentuk *feature* memungkinkan menulis bentuk sajian berita yang memiliki tingkat akurasi waktu yang lebih lama, dengan sudut angle yang lebih beragam. Memiliki unsur 5W+1H dengan lebih memberikan bagian yang lebih terhadap sisi lain dari kemanusiaan yang diangkat oleh seorang jurnalis.

menandakan bahwa tahap sebaran ini pemberitaan telah diterima oleh khalayak pembaca.

Konstruksi jurnalisme warga berbasis santri tentang pemberitaan pesantren, seluk beluk syi'ar agama di bawah asuhan para kyai dan berita menjegal virus radikal dibentuk melalui citra positif di tengah-tengah pemberitaan negatif tentang pesantren oleh media massa kebanyakan. Kedua hal tersebut dipengaruhi oleh faktor ideologis dan historis yang berada di lingkungan Pondok Pesantren Lirboyo.

Secara ideologis, jurnalisme warga berbasis santri menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keberagaman berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis atau ahlu sunnah wal jama'ah sehingga dalam pemberitaannya seringkali mencerminkan hal tersebut. Misalnya, berita tentang penangkal virus radikal dan aksi terorisme bagi kemanusiaan. Al-Muttaqin menilai hal ini harus dapat dilihat secara historis bahwa pihak para Kyai Lirboyo memiliki kedekatan dengan pihak kepolisian dan intelejen. Hal ini dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pemberitaan ini tidak berimbang, karena ia terbentuk berdasarkan perspektif kepolisian yang cenderung tendensius terhadap gerakan pesantren.

Tahap Konfirmasi

Konfirmasi adalah tahapan ketika media maupun khalayak memberi argumentasi dan akuntabilitas terhadap pilihannya untuk terlibat dalam tahap pembentukan konstruksi. Bagi media, tahapan ini perlu sebagai bagian untuk memberi argumentasi terhadap alasan-alasannya dalam mengkonstruksi suatu realitas sosial. Sedangkan bagi khalayak pembaca, tahapan ini juga sebagai bagian untuk menjelaskan mengapa ia terlibat dan bersedia hadir dalam proses konstruksi sosial.² Sedangkan

²Lihat Burhan Bungin, 2011. *Konstruksi Sosial Media Massa*. Jakarta : Kencana bandingkan dengan Bill Kovach. 2004. *Elemen-Elemen Jurnalisme*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

bagi khalayak pembaca, tahapan ini juga sebagai bagian untuk menjelaskan mengapa ia terlibat dan bersedia hadir dalam proses konstruksi sosial.

Al-Muttaqin menghimbau jurnalis warga untuk meluruskan pemberitaan tentang isu-isu yang tidak menguntungkan umat Islam, sehingga pemberitaan muncul dari kalangan para santri sebagai subjek pemberitaan, yang disebarkan kepada khalayak luas. Upaya yang seringkali berkesan fitnah bagi umat Islam, Al-Muttaqin melihatnya sebagai upaya mengkonfirmasi pada pihak lain.

Tahap konfirmasi ini juga dilakukan jurnalis warga dengan mengkonfirmasi beberapa situs internet yang dipakai sebagai media pemberitaan yang kurang berkenan dengan Islam yang sebenarnya.

Al-Muttaqin juga menganggap bahwa situs-situs komunitas muslim sering memicu interaksi dari khalayak yang mengemukakan pendapat mereka tentang pemberitaan mereka. Respon-respon yang sebagian besar bernada negatif dari pembaca menunjukkan bahwa mereka mendukung opini Al-Muttaqin dan tidak setuju atas apa yang disampaikan media umum tentang radikalisme di pesantren.

Simpulan

Kehadiran jurnalisme warga berbasis santri di Pondok Pesantren Lirboyo berupaya mempengaruhi opini publik yang terdapat dalam ruang publik. Pemberitaan yang seringkali merugikan umat Islam dengan mengusung radikalisme Islam dan fitnah-fitnah setidaknya dapat diakomodir dengan hadirnya berita-berita penyeimbang dari warga masyarakat yang juga bagian dari pelaku pesan dalam masyarakat itu sendiri. Ruang publik yang selama ini banyak didominasi oleh media massa umum yang berpihak pada kapitalisme yang mengejar nilai jual tinggi kadangkala tidak memperhatikan kepentingan pihak-pihak tertentu yang sebenarnya merasa

banyak dirugikan dengan adanya opini yang berkembang. Respon-respon dari Al-Muttaqin atas isu yang berkembang yang banyak menyudutkan umat Islam setidaknya ditekan dengan adanya counter opini dari pengembangan jurnalisme warga.

Untuk dapat menjadi sebuah pengetahuan social maka kehadiran jurnalisme berbasis warga oleh santri menunjukkan bahwa mereka mendukung Al-Muttaqin dan tidak setuju tentang penyudutan umat Islam. Hal ini tidak terlepas dari factor lain di luar konstruksi social itu sendiri. Karena hal ini membutuhkan konfirmasi individu untuk memperkuat keputusannya tentang suatu pengetahuan yang diperoleh dari pemberitaan. Meskipun tahap ini berada di luar konstruksi pemberitaan, namun tahap ini diperlukan dalam proses pembentukan untuk memperkuat konstruksi kearah tahap berikutnya hingga pesan media itu dapat diterima masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, Elvinaro dan Lukiati Komala. 2007. *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*. Bandung: Simbiosis.
- Bungin, Burhan. 2011. *Konstruksi Sosial Media Massa*. Jakarta: Kencana.
- Effendi, Yusuf. 2010. *Makalah : Radikalisme Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Effendy, Onong Uchjana. 1993. *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Eriyanto. 2009. *Analisis Framing*. Yogyakarta: LkiS.
- Habulloh. 1999. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Kovach, Bill dan Tom Resentiel. 2004. *Elemen-Elemen Jurnalisme*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi dan Kedutaan Besar AS di Jakarta.
- Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama. 2005. *Jurnalistik: Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sumadiria, Haris. 2005. *Jurnalistik Indonesia*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- Majalah Misykat Vo. X Edisi 77 Oktober 2014.